

Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Kerangka ISPO dan RSPO: Tinjauan Aspek Sumber Daya Manusia, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Tata Kelola, dan Daya Saing Industri

**Ihsan Nur Hariansyah¹, Chalep Sitanggang², Natalius Zega³, Marzuti Isra^{4*},
Suhendri⁵**

Institut Teknologi Sawit Indonesia, Indonesia
E-mail Korespondensi: marzuti_isra@itsi.ac.id

Submitted: 14th July 2026 | **Edited:** 14th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Hariansyah, I. N., Sitanggang, C., Zega, N., Isra, M., & Suhendri, S. (2026). Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Kerangka ISPO dan RSPO: Tinjauan Aspek Sumber Daya Manusia, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Tata Kelola, dan Daya Saing Industri. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 1712-1727.

ABSTRACT

Indonesia remains the world's largest producer of palm oil, yet the industry continues to face significant sustainability challenges related to deforestation, peatland conversion, labour issues, social conflicts, and increasingly stringent international market requirements. These challenges have intensified the need to strengthen sustainable certification systems through the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). This study aims to examine the complementary roles of ISPO and RSPO in supporting the sustainability and global competitiveness of Indonesia's palm oil sector from the perspectives of human resources, social responsibility, economic performance, environmental management, governance, and industrial competitiveness. The study employed a qualitative literature review by analysing recent academic publications, government regulations, and institutional reports published mainly between 2020 and 2026. The collected literature was classified into thematic dimensions and examined through descriptive qualitative analysis to identify convergent findings and emerging issues. The results indicate that ISPO provides a mandatory national regulatory framework, whereas RSPO enhances access to international premium markets through stricter sustainability standards. Integrating both certification systems can improve operational performance, strengthen governance, reduce regulatory risks, and enhance market competitiveness. Nevertheless, limited certification among independent smallholders and evolving international regulations remain important challenges for achieving long-term sustainability.

Keywords: ISPO, RSPO, Sustainability, Oil Palm Plantation, Competitiveness

PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui kontribusinya terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah pedesaan. Direktorat Jenderal Perkebunan (2024) melaporkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit

Indonesia telah melampaui 16 juta hektare dengan kontribusi ekspor yang terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, ekspansi industri sawit juga memunculkan berbagai tantangan keberlanjutan, antara lain deforestasi, konversi lahan gambut, penurunan keanekaragaman hayati, konflik tenurial, serta isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian pasar internasional. Menurut Supriatna et al. (2024), keberlanjutan perkebunan sawit tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola yang saling berkaitan. Kondisi tersebut menyebabkan keberlanjutan industri sawit menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan multidimensi dalam pengelolaannya.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar sertifikasi nasional yang bersifat wajib melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, sedangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berkembang sebagai standar internasional yang bersifat sukarela dengan penekanan yang lebih kuat pada prinsip No Deforestation, No Peat, dan Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Hadi et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan ISPO bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan praktik perkebunan yang baik, sementara Suhardjo dan Suparman (2025) menunjukkan bahwa harmonisasi antara ISPO dan RSPO menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Selain itu, implementasi sertifikasi keberlanjutan semakin memperoleh perhatian setelah munculnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menuntut transparansi dan keterlacakan rantai pasok komoditas berbasis lahan, termasuk minyak sawit. Regulasi tersebut mendorong perusahaan dan petani untuk memperkuat sistem ketertelusuran serta kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji manfaat maupun kendala penerapan sertifikasi keberlanjutan. Liana et al. (2023) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, pembiayaan, dan pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama bagi petani swadaya dalam memperoleh sertifikasi. Nainggolan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman petani mengenai standar ISPO dan RSPO berdampak pada lambatnya proses sertifikasi. Sementara itu, penelitian Tanjung et al. (2022) membuktikan bahwa penerapan standar keberlanjutan mampu meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila didukung oleh kelembagaan petani yang

kuat. Di tingkat internasional, penelitian mengenai petani sawit di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kelompok tani, serta dukungan multipihak yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas ISPO dan RSPO secara terpisah atau hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi keberlanjutan, seperti aspek lingkungan, ekonomi, atau kesiapan petani. Kajian yang mengintegrasikan kedua sistem sertifikasi dalam satu kerangka analisis yang mencakup aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, serta implikasinya terhadap daya saing industri kelapa sawit Indonesia masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting mengingat meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap produk sawit yang berkelanjutan, transparan, dan memiliki sistem ketertelusuran yang baik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menyajikan sintesis komprehensif mengenai hubungan antara penerapan ISPO dan RSPO dengan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia serta tantangan implementasinya di tingkat perusahaan maupun petani swadaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keberlanjutan perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam kerangka ISPO dan RSPO dengan meninjau aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan daya saing industri. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan analisis yang mengintegrasikan kedua skema sertifikasi tersebut secara komprehensif melalui pendekatan studi kepustakaan sehingga menghasilkan sintesis yang tidak hanya membandingkan karakteristik ISPO dan RSPO, tetapi juga menjelaskan peran keduanya sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan industri sawit Indonesia di tengah dinamika regulasi dan perdagangan global. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian keberlanjutan perkebunan sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah, perusahaan perkebunan, dan petani dalam memperkuat implementasi sertifikasi keberlanjutan.

LANDASAN TEORI

Keberlanjutan (sustainability) merupakan konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan

sosial tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini berkembang melalui pendekatan Triple Bottom Line yang diperkenalkan oleh Elkington dan hingga kini menjadi landasan utama dalam pengelolaan industri berbasis sumber daya alam. Dalam sektor perkebunan kelapa sawit, keberlanjutan tidak hanya diukur dari produktivitas dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, melindungi hak-hak pekerja dan masyarakat, serta menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu dan Pratama (2024), keberhasilan pembangunan perkebunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ketiga dimensi tersebut berjalan secara seimbang sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis dan sosial.

Dari perspektif tata kelola perusahaan, Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemegang saham (shareholders), tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemerintah, pekerja, petani, masyarakat lokal, konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, penerapan teori ini tercermin pada kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar ketenagakerjaan, menghormati hak masyarakat adat melalui prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), mengurangi konflik sosial, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan petani swadaya. Pendekatan tersebut diperkuat oleh konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang (Hakim & Setiawan, 2023).

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga didukung oleh pendekatan Ecosystem Services, yaitu konsep yang menilai manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang dihasilkan oleh ekosistem bagi kehidupan manusia. Dalam industri kelapa sawit, pendekatan ini menjadi dasar penting dalam perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan kawasan dengan cadangan karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS), karena keberadaan hutan dan lahan gambut memberikan jasa lingkungan berupa penyimpanan karbon, pengaturan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, praktik pengelolaan perkebunan yang mengabaikan fungsi ekosistem berpotensi meningkatkan

risiko kerusakan lingkungan sekaligus menurunkan daya saing produk di pasar internasional yang semakin menuntut penerapan prinsip keberlanjutan (Rahayu & Pratama, 2024).

Implementasi konsep keberlanjutan dalam industri kelapa sawit Indonesia diwujudkan melalui dua skema sertifikasi utama, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). ISPO ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 sebagai standar nasional yang bersifat wajib untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, penerapan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices), perlindungan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Di sisi lain, RSPO merupakan skema sertifikasi internasional yang dikembangkan oleh organisasi multipemangku kepentingan dan menerapkan persyaratan yang lebih ketat, khususnya terkait prinsip No Deforestation, No Peat, transparansi rantai pasok, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat melalui FPIC (Nugroho & Wardana, 2023; Santoso et al., 2025). Menurut Suhardjo dan Suparman (2025), harmonisasi antara ISPO dan RSPO menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan penerimaan produk minyak sawit Indonesia di pasar global yang semakin mengutamakan aspek keberlanjutan.

Berdasarkan teori dan konsep tersebut, penelitian ini memandang bahwa keberlanjutan perkebunan kelapa sawit merupakan hasil interaksi berbagai dimensi yang saling memengaruhi, yaitu sumber daya manusia, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, serta daya saing industri. Penerapan ISPO dan RSPO diposisikan sebagai instrumen tata kelola yang mampu memperkuat hubungan antara kepatuhan regulasi nasional dengan tuntutan pasar internasional. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan perspektif keberlanjutan, Stakeholder Theory, dan Ecosystem Services sebagai landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana kedua sistem sertifikasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan dan daya saing industri kelapa sawit Indonesia secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis keberlanjutan perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam kerangka sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on

Sustainable Palm Oil (RSPO). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur secara sistematis dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga terkait yang diterbitkan pada periode 2019–2026. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan portal Garuda, menggunakan kata kunci ISPO, RSPO, sustainable palm oil, oil palm sustainability, smallholder certification, dan palm oil governance. Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki relevansi dengan tujuan penelitian, dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi atau dokumen resmi pemerintah, membahas aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, maupun daya saing industri kelapa sawit, serta tersedia dalam bentuk naskah lengkap (full text). Tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh sumber informasi yang kredibel dan sesuai dengan fokus penelitian sebagaimana direkomendasikan oleh Snyder (2019) dan Xiao dan Watson (2019).

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan tema penelitian, dan sintesis literatur untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta isu-isu yang berkembang mengenai implementasi ISPO dan RSPO di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian ke dalam enam dimensi utama, yaitu sumber daya manusia, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan daya saing industri, kemudian menginterpretasikan hubungan antartemuan secara komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menyusun sintesis konseptual mengenai peran komplementer ISPO dan RSPO dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih sistematis dan berbasis bukti ilmiah.

HASIL PENELITIAN

Perbandingan ISPO dan RSPO

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong penerapan prinsip keberlanjutan pada industri kelapa sawit, namun keduanya dibangun berdasarkan karakteristik kelembagaan, ruang lingkup, dan orientasi yang

berbeda. Menurut Nugroho dan Wardana (2023), ISPO merupakan sistem sertifikasi nasional yang bersifat wajib (mandatory) bagi pelaku usaha perkebunan sesuai ketentuan pemerintah Indonesia, sedangkan RSPO merupakan standar internasional yang bersifat sukarela (voluntary) dan dikembangkan melalui pendekatan multipemangku kepentingan (multi-stakeholder). Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap standar yang diterapkan, cakupan wilayah implementasi, serta orientasi pasar yang dituju.

Tabel 1. Perbandingan ISPO dan RSPO

Aspek	ISPO	RSPO
Sifat	Wajib (Mandatory)	Sukarela (Voluntary)
Pengelola	Komite ISPO (Pemerintah Indonesia)	Organisasi multipemangku kepentingan internasional
Cakupan	Nasional	Global
Standar lingkungan	Mengacu pada regulasi nasional	No Deforestation, No Peat, FPIC, HCV, HCS
Harga premium	Tidak tersedia	Tersedia pada produk CSPO

Sumber : Diolah dari Nugroho dan Wardana (2023), Hadi et al. (2023), serta Suhardjo dan Suparman (2025)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa perbedaan mendasar antara ISPO dan RSPO terletak pada karakter regulasi dan orientasi implementasinya. Hadi et al. (2023) menjelaskan bahwa ISPO lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional, termasuk legalitas usaha, penerapan praktik budidaya yang baik, pengelolaan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebaliknya, Suhardjo dan Suparman (2025) menjelaskan bahwa RSPO menetapkan persyaratan keberlanjutan yang lebih komprehensif melalui penerapan prinsip No Deforestation, No Peat, High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat melalui mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ISPO berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola nasional, sedangkan RSPO lebih berorientasi pada peningkatan daya saing produk di pasar internasional.

Selain memiliki karakteristik yang berbeda, hasil kajian juga menunjukkan bahwa kedua sistem sertifikasi tidak bersifat saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Nugroho dan Wardana (2023) menjelaskan bahwa ISPO memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam memenuhi regulasi nasional, sedangkan RSPO memberikan nilai tambah melalui peningkatan kepercayaan konsumen global, akses terhadap pasar premium, dan penguatan reputasi perusahaan. Sejalan dengan itu, Suhardjo dan

Suparman (2025) menyatakan bahwa penerapan kedua skema sertifikasi secara bersamaan berpotensi meningkatkan keberlanjutan pengelolaan perkebunan sekaligus memperkuat posisi daya saing minyak sawit Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap produk yang berkelanjutan.

Aspek Sumber Daya Manusia dan Sosial

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia dan sosial merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi sertifikasi keberlanjutan pada industri kelapa sawit Indonesia. Hadi et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis dalam penerapan Good Agricultural Practices (GAP), tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kemampuan dalam mengelola administrasi dan dokumentasi sertifikasi. Pada tingkat perusahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan teknis, pendampingan internal, serta penerapan sistem manajemen yang mendukung pemenuhan standar ISPO maupun RSPO.

Dari aspek sosial, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kedua sistem sertifikasi menempatkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Nugroho dan Wardana (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), penyelesaian konflik lahan secara partisipatif, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan indikator penting dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas petani swadaya, dan kemitraan antara perusahaan dengan petani turut memperkuat penerimaan sosial terhadap kegiatan perkebunan sekaligus mendukung keberhasilan implementasi sertifikasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa petani swadaya masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai standar keberlanjutan, rendahnya kemampuan administrasi, terbatasnya akses terhadap pendampingan teknis, serta tingginya biaya sertifikasi. Nainggolan et al. (2024) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pemahaman petani terhadap persyaratan ISPO dan RSPO menjadi salah satu penyebab lambatnya adopsi sertifikasi pada perkebunan rakyat. Sementara itu, Hadi et al. (2023) menegaskan bahwa

percepatan sertifikasi memerlukan dukungan pemerintah melalui pembinaan kelembagaan, pendampingan teknis, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani menjadi faktor penting dalam memperluas implementasi praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Aspek Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah sentra perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan (2024) melaporkan bahwa nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar USD 27,7 miliar pada tahun 2023, dengan kontribusi sekitar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain berperan sebagai komoditas ekspor utama, industri kelapa sawit juga menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani dan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan budidaya, pengolahan, hingga distribusi produk sawit, sehingga sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun pembangunan wilayah perdesaan.

Hasil telaah literatur juga menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi keberlanjutan memberikan manfaat ekonomi yang tidak hanya berasal dari peningkatan harga jual produk, tetapi juga dari meningkatnya efisiensi operasional perusahaan. Hadi et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan standar budidaya yang sesuai dengan prinsip ISPO mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun melalui perbaikan sistem administrasi, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap praktik budidaya yang baik. Pada perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi RSPO, minyak sawit bersertifikat (Certified Sustainable Palm Oil/CSPO) memiliki peluang memperoleh harga premium dibandingkan minyak sawit konvensional sehingga meningkatkan nilai tambah produk pada pasar internasional. Dengan demikian, sertifikasi keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, hasil kajian memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi dari sertifikasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha, khususnya petani swadaya. Liana et al. (2023) mengemukakan bahwa keterbatasan modal, tingginya biaya sertifikasi,

rendahnya produktivitas lahan, serta minimnya pendampingan teknis masih menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi. Sejalan dengan itu, Nainggolan et al. (2024) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman petani terhadap persyaratan ISPO dan RSPO menyebabkan sebagian besar petani belum mampu memanfaatkan peluang pasar yang mensyaratkan produk bersertifikat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan daya saing ekonomi sektor kelapa sawit tidak hanya bergantung pada penerapan standar keberlanjutan, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan, akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas petani secara berkelanjutan.

Aspek Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek lingkungan merupakan dimensi yang paling banyak mendapat perhatian dalam implementasi sertifikasi ISPO maupun RSPO. Berbagai literatur mengidentifikasi bahwa isu utama yang masih dihadapi industri kelapa sawit meliputi deforestasi, konversi lahan gambut, emisi gas rumah kaca, pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), serta penurunan keanekaragaman hayati akibat perubahan tutupan lahan. Hadi et al. (2023) menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan menjadi salah satu prinsip utama dalam sertifikasi ISPO sebagai upaya memastikan kegiatan perkebunan tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu, baik ISPO maupun RSPO menempatkan perlindungan lingkungan sebagai persyaratan utama dalam penerapan praktik perkebunan berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ISPO menekankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan lingkungan yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional, termasuk pengelolaan limbah, perlindungan kawasan lindung, dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan. Sementara itu, Suhardjo dan Suparman (2025) menjelaskan bahwa RSPO menerapkan persyaratan yang lebih komprehensif melalui pendekatan High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), larangan pembukaan hutan primer, larangan pembukaan lahan gambut baru, serta penerapan sistem pemantauan perubahan penggunaan lahan yang lebih ketat. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki fokus yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan mengurangi dampak negatif aktivitas perkebunan terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kredibilitas produk sawit di pasar internasional.

Selain itu, hasil telaah memperlihatkan bahwa perusahaan yang menerapkan standar keberlanjutan cenderung memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur, meliputi pemantauan kualitas air, pengelolaan limbah cair, pengurangan penggunaan bahan kimia, konservasi kawasan bernilai ekologis tinggi, dan rehabilitasi lahan yang mengalami degradasi. Namun demikian, Liana et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi praktik tersebut masih menghadapi berbagai kendala pada perkebunan rakyat karena keterbatasan sumber daya, teknologi, dan pembiayaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga sertifikasi, dan petani agar standar yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara lebih luas.

Aspek Tata Kelola dan Daya Saing Industri

Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola (governance) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sertifikasi keberlanjutan. Hadi et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik ditandai oleh adanya kepastian legalitas usaha, transparansi pengelolaan perusahaan, sistem dokumentasi yang lengkap, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara konsisten. Dalam implementasinya, baik ISPO maupun RSPO mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem administrasi dan pelaporan sehingga setiap tahapan produksi dapat ditelusuri (traceability) secara jelas mulai dari kebun hingga produk akhir. Penerapan sistem tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan membangun kepercayaan pasar terhadap produk minyak sawit Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan rantai pasok. Direktorat Jenderal Perkebunan (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi mendukung efisiensi pencatatan produksi, pemantauan asal bahan baku, serta penyusunan dokumen sertifikasi sehingga memperkuat sistem ketertelusuran produk. Sistem traceability tersebut menjadi semakin penting untuk memenuhi tuntutan pasar internasional, khususnya setelah diberlakukannya European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mengharuskan komoditas berbasis lahan memiliki informasi asal-usul yang jelas dan dapat diverifikasi.

Dari perspektif daya saing, hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan ISPO dan RSPO memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai

produsen minyak sawit terbesar di dunia. Suhardjo dan Suparman (2025) menyatakan bahwa harmonisasi antara standar sertifikasi nasional dan internasional mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses ke pasar ekspor, serta memperkuat posisi minyak sawit Indonesia dalam perdagangan global. Namun demikian, Liana et al. (2023) mengemukakan bahwa masih terdapat berbagai tantangan, terutama rendahnya tingkat sertifikasi petani swadaya, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan belum optimalnya pendampingan teknis. Selain itu, Nainggolan et al. (2024) menambahkan bahwa rendahnya pemahaman petani terhadap persyaratan sertifikasi masih menjadi hambatan dalam memperluas penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, percepatan sertifikasi, digitalisasi rantai pasok, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan kebijakan yang konsisten menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISPO dan RSPO bukan merupakan dua sistem sertifikasi yang saling bersaing, melainkan instrumen yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. ISPO berperan sebagai instrumen tata kelola nasional yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan RSPO lebih berorientasi pada pemenuhan standar keberlanjutan global dan kebutuhan pasar internasional. Temuan ini memperkuat Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984), yaitu bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pekerja, petani, masyarakat lokal, konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku pasar internasional. Dalam konteks industri kelapa sawit, penerapan kedua skema sertifikasi menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tuntutan sosial dan lingkungan sehingga meningkatkan legitimasi usaha di tingkat nasional maupun global. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Suhardjo dan Suparman (2025) yang menyatakan bahwa harmonisasi standar nasional dan internasional merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di tengah meningkatnya persyaratan keberlanjutan pada perdagangan global.

Dari aspek sumber daya manusia dan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan pelatihan, peningkatan kompetensi pekerja, pendampingan petani swadaya, serta penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan implementasi standar keberlanjutan. Hasil tersebut mendukung temuan Liana et al. (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi pada petani swadaya lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis, kelembagaan, dan pembiayaan dibandingkan rendahnya komitmen terhadap keberlanjutan. Nainggolan et al. (2024) juga menegaskan bahwa peningkatan pemahaman petani terhadap persyaratan ISPO dan RSPO berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan sertifikasi. Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan menjadi prasyarat penting untuk memperluas implementasi sertifikasi, khususnya pada perkebunan rakyat yang mengelola proporsi luas areal perkebunan yang signifikan di Indonesia.

Pada dimensi ekonomi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sertifikasi keberlanjutan tidak hanya meningkatkan akses terhadap pasar ekspor, tetapi juga mendorong efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan reputasi perusahaan. Temuan ini mendukung konsep Triple Bottom Line yang menempatkan keberlanjutan sebagai keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan. Penerapan praktik budidaya yang sesuai standar, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta peningkatan transparansi rantai pasok memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kepercayaan pasar dan peluang memperoleh nilai tambah produk. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh petani swadaya karena masih terdapat hambatan berupa biaya sertifikasi, keterbatasan akses pembiayaan, dan rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi tidak hanya bergantung pada pemenuhan persyaratan teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan pemerintah dan kelembagaan yang mampu meningkatkan kapasitas petani.

Pada aspek lingkungan dan tata kelola, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ISPO dan RSPO mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem

pengelolaan lingkungan melalui perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pengelolaan limbah, penerapan sistem ketertelusuran (traceability), serta peningkatan transparansi dalam rantai pasok. Hasil tersebut konsisten dengan pendekatan Ecosystem Services yang memandang ekosistem sebagai penyedia berbagai manfaat ekologis dan ekonomi yang harus dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan pasar internasional, termasuk implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak lagi hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi telah berkembang menjadi faktor strategis dalam menjaga akses pasar dan keberlanjutan industri. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi, digitalisasi rantai pasok, serta percepatan sertifikasi petani swadaya menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menyajikan sintesis yang mengintegrasikan dua sistem sertifikasi keberlanjutan, yaitu ISPO dan RSPO, dalam enam dimensi utama, yaitu sumber daya manusia, sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan daya saing industri. Berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang umumnya membahas salah satu aspek atau salah satu sistem sertifikasi secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua skema tersebut memiliki hubungan yang komplementer dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional, bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi rantai pasok, serta bagi petani swadaya untuk memperluas adopsi praktik budidaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kemitraan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, petani, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya agar tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dicapai secara seimbang.

KESIMPULAN

Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar sertifikasi, tetapi terutama oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi,

lingkungan, tata kelola, dan daya saing ke dalam praktik pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ISPO dan RSPO memiliki peran yang bersifat komplementer, di mana ISPO memperkuat kepatuhan terhadap regulasi nasional, sedangkan RSPO meningkatkan penerimaan produk pada pasar global melalui penerapan standar keberlanjutan yang lebih luas. Sinergi kedua sistem tersebut menjadi faktor strategis dalam memperkuat daya saing industri kelapa sawit Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, ketertelusuran, dan perlindungan lingkungan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keberlanjutan industri sawit memerlukan penguatan kapasitas petani swadaya, harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional, pengembangan sistem ketertelusuran yang andal, serta kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan masyarakat. Dengan demikian, sertifikasi keberlanjutan tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen pemenuhan persyaratan pasar, tetapi sebagai fondasi dalam membangun tata kelola perkebunan kelapa sawit yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024). *Statistik perkebunan unggulan nasional 2021-2023*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J. A., & Septya, F. (2023). Strategi percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21-42.
- Hakim, A., & Setiawan, R. (2023). Environmental governance and ecosystem services in sustainable palm oil plantations. *Journal of Environmental Management*, 340, 118021.
- Liana, L., Siregar, H., Sinaga, B. M., & Hakim, D. B. (2023). Kendala penerapan sertifikasi keberlanjutan oleh perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia: Sebuah tinjauan empiris. *Dinamika Pertanian*, 39(2), 131-140.
- Nainggolan, H. L., Butar-Butar, K. M., Lawolo, O., Sitompul, J. B. M., & Nainggolan, L. H. (2024). Strategi peningkatan pemahaman petani terhadap sertifikasi ISPO-RSPO untuk mendukung sawit rakyat berkelanjutan. *Agrikultura*, 35(3), 517-528.
- Nugroho, A., & Wardana, D. (2023). Comparative analysis of ISPO and RSPO certification systems in promoting sustainable palm oil governance. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 69(3), 245-258.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Rahayu, D., & Pratama, A. (2024). Sustainability dimensions in Indonesian palm oil plantation management: An integrated perspective. *Sustainability*, 16(11), 4383.

- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2018). *RSPO principles and criteria for the production of sustainable palm oil*. Roundtable on Sustainable Palm Oil.
- Santoso, B., Wibowo, A., & Prasetyo, H. (2025). Strengthening sustainable palm oil governance through RSPO implementation in Indonesia. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 23(1), 55-71.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Suhardjo, I., & Suparman, M. (2025). Harmonizing sustainability certification standards: The Indonesian palm oil case. *International Food and Agribusiness Management Review*, 28(1), 19-34.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.